

## Ringkasan

SINGGIH PERMANA ADHI, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Tinjauan Yuridis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Jual Beli di Kabupaten Banyumas, Komisi Pembimbing, Ketua Dr. Kadar Pamuji, S.H, M.H dan anggota Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H, M.M, M.H

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk wilayah Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jo Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB.

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan penerapan BPHTB serta memberikan penjelasan tentang akibat hukum bagi PPAT berkaitan dengan penerapan BPHTB.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu penerapan BPHTB berdasarkan jual beli pelaksanaannya meliputi proses pengisian SSPD BPHTB, penetapan obyek pajak, subyek pajak, penghitungan tarif pajak, penelitian atau *validasi*. PPAT yang menandatangani akta peralihan hak, tanpa memeriksa pajak-pajak sudah terbayar dan tervalidasi memberikan akibat hukum bagi PPAT berupa konsekuensi adanya sanksi administratif berupa denda untuk setiap pelanggaran. Penegakan hukum atas sanksi administratif denda terhadap PPAT tersebut dan tata cara pelaksanaannya tidak dijelaskan dan belum diatur lebih lanjut dalam UU PDRD, Perda Pajak Daerah atau ke dalam peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Pajak Daerah, BPHTB, Pejabat Pembuat Akta Tanah

## Summary

SINGGIH PERMANA ADHI, Notary Masters Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Juridical Review of Acquisition of Land and Building Rights Based on Buying and Selling in Banyumas Regency, Advisory Commission, Chair Dr. Kadar Pamuji, S.H, M.H and members of Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H, M.M, M.H

The collection of regional taxes and levies is based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, and for the Banyumas Regency region has been regulated in Regional Regulation Number 1 of 2011 concerning Regional Taxes jo Regional Regulation Number 22 of 2016 concerning Second Amendment to Regional Regulations Number 1 of 2011 concerning Regional Taxes. One type of tax that is the regional authority is the Obligation of Land and Building Rights hereinafter referred to as BPHTB.

Research Objectives To find out and review the laws and regulations and the application of BPHTB and provide an explanation of the legal consequences for PPAT relating to the application of BPHTB. The method used in this research is the normative juridical approach. The data used are secondary data and primary data as a complement to secondary data.

The results of research and discussion, namely the application of BPHTB based on the sale and purchase of the implementation, includes the filling process of the BPHTB SSPD, determination of tax objects, tax subjects, calculation of tax rates, research or validation. The PPAT who signs the deed of transferring rights, without checking that the taxes have been paid and is validated, has a legal consequence for the PPAT in the form of administrative sanctions in the form of fines for each violation. Law enforcement for administrative sanctions for these PPAT fines and the procedures for their implementation are not explained and have not been regulated further in the PDRD Law, Regional Tax Regulations or in the implementing regulations.

Keywords: Local Taxes, BPHTB, Land Drafting Officials